



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA PANSUS RUU TENTANG LANDAS KONTINEN  
DENGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, MENTERI  
PERTAHANAN, MENTERI LUAR NEGERI,  
DAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- : 1 (satu)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021  
Waktu : Pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Pansus B Gd. Nusantara II Lt. 3  
Ketua Rapat: : Maman Abdurrahman, S.T. (Pimpinan/F-PG)  
Acara : 1. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Landas Kontinen;  
2. Pandangan Fraksi-fraksi;  
3. Mengesahkan Jadwal Acara Pansus dan Mekanisme Pembahasan.
- Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Panitia Khusus DPRRI)
- Hadir : A. Anggota DPRRI:  
11 dari 30 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
4 dari 7 orang Anggota
    1. TB. Hasanuddin
    2. Yohanis Fransiskus Lema
    3. Riezky Aprilia
    4. Paramita Widya Kusuma
  2. FRAKSI PARTAI GOLKAR  
1 dari 4 orang Anggota
    1. Maman Abdurrahman, S.T.
  3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
1 dari 4 orang Anggota
    1. Bambang Haryadi, S.E.
  4. FRAKSI PARTAI NASDEM  
1 dari 3 orang Anggota
    1. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.N.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
1 dari 3 orang Anggota  
1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
2 dari 3 orang Anggota  
1. Rizki Aulia Rahman Natakusumah  
2. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
1 dari 3 orang Anggota  
1. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
0 dari 2 orang Anggota:  
1. -
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
0 dari orang 1 Anggota  
1. -

B. UNDANGAN

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Hukum dan HAM
5. Undangan lainnya

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):**

Bapak Wamen dari Kemenlu mulai ya.

***Auzu billahi minasy syaitanir rajim.  
Bismillahirrahmanirahim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera saya ucapkan untuk semuanya.  
Shalom.  
Om swasti astu.  
Nama Budhaya.  
Salam kebajikan.***

Pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kehadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala, alhamdulillah* sampai hari ini di tengah

kondisi pandemi kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*. Dan tidak lupa sholawat dan salam-Nya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*.

Syukur *alhamdulillah* sudah berkumpul bersama dengan kita. Ini sebelumnya saya sampaikan lebih dahulu Bapak-bapak dari pemerintah hadir bersama-sama dengan kita Pak Menteri Kelautan, salam hormat Pak. Ada Pak Wamen ini, jadi hari ini kita ada dua Wamen satu Menteri. Jadi yang satu mantan Wamen jadi Menteri, satu lagi Wamen.

**ANGGOTA:**

Wamen satu pak.

**KETUA RAPAT:**

Wamen satu wamen dua ya, dan dari Kemenlu salam hormat Pak, dari kami. Dari Kemenkumham belum hadir ya, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa lanjut saja.

Bersama-sama dengan kami Pak, lengkap Pimpinan Pansus RUU Landas Kontinen ini. Di sebelah kanan saya Pak TB dari Fraksi PDIP, di sebelah kiri saya Pak Bambang dari Gerindra, dan sebelah kiri saya lagi Pak Taufik Basari dari NasDem.

Saya sendiri Maman Abdurrahman dari Fraksi Partai Golkar, dan di sini hadir teman-teman kita dari PKS, dari PKB, dari Demokrat, dari PDIP yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Secara prinsip Pak, forum rapat kita hari ini rapat kerja kita hari ini, sudah dihadiri lengkap oleh 7 fraksi, artinya sudah memenuhi syarat kuorum. Jadi, *Insyah Allah* kita bisa memulai rapat ini.

Pada kesempatan kali ini puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala* dan selanjutnya saya ingin memohon pada forum rapat ini untuk saya buka sidang rapat kerja kita, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kita buka raker ini.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)**

Pertama-tama ini ada protokoler ini Pak Menteri, jadi saya harus baca sedikit apa yang memang menjadi ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menkumham yang telah bersedia memenuhi undangan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen pada kesempatan hari ini dengan agenda acara sebagai berikut.

Yang pertama adalah kita akan mendengarkan penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang Landas Kontinen ini. Artinya apa Pak? Kita butuh pandangan, penjelasan ya mungkin tidak bisa detail karena nanti detailnya bisa kita lanjutkan dalam agenda rapat selanjutnya. Ini binatang apa, ini namanya

Landas Kontinen gitu, kurang lebih seperti itu, jenis kelaminnya apa, dan lain sebagainya.

Lalu yang kedua adalah nanti dari masing-masing fraksi akan memberikan pandangannya.

Lalu yang ketiga adalah pengesahan jadwal acara dan mekanisme pembahasan, yang nanti akan saya bacakan tapi mungkin secara general.

Rapat kerja hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul berapa? 15.00 WIB, ya berarti 30 menit lagi kita. Oke, saya minta pandangan dari forum rapat sampai jam berapa? 15.30 WIB ya, gimana pemerintah? Oke ya, 15.30 WIB ya. Oke, rapat akan berlangsung sampai dengan pukul 15.30 WIB.

**(RAPAT: SETUJU)**

Namun, apabila masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pembicaraan nanti bisa kita lanjutkan.

Pada Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan yang diwakilkan, Menteri Luar Negeri yang diwakilkan, dan juga Menteri Hukum dan HAM yang diwakilkan.

Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang Landas Kontinen melalui Surat Presiden Nomor R-42/Pres/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020. Selanjutnya DPRRI telah membentuk Pansus RUU Landas Kontinen DPRRI, dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2020, untuk melakukan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen bersama dengan pemerintah. Oleh karena itu, sampailah kita pada Rapat Kerja Pansus hari ini tentang Landas Kontinen guna melakukan rapat dan kegiatan pertama pembahasan RUU dalam rangka pembicaraan tingkat pertama bersama dengan pemerintah.

Selanjutnya, agenda pertama kami persilakan kepada pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk disampaikan kepada kami terkait mengenai RUU Landas Kontinen ini.

Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

Mohon ijin Pimpinan, jadi namanya Menteri Kelautan dan Perikanan, cuma dibalik.

**Baik, terima kasih.**

***Bismillahirrahmanirahim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang menjelang sore.**

**Salam sejahtera bagi kita semuanya.**

***Om swasti astu.***

***Namo budhaya.***

**Salam kebajikan.**

**Yang saya hormati para Pimpinan dan Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPRRI,  
Yang terhormat Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri yang mewakili, Wakil Menteri Hukum dan HAM tapi kosong sebenarnya di sini mudah-mudahan ada.**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen yang merupakan inisiatif pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen telah dimulai sejak tahun 2017. Proses ini merupakan manifestasi wujud kepedulian dari pemerintah bersama DPRRI dalam mengatur pengelolaan sumber daya kelautan di landas kontinen. Dalam kata lain proses ini merupakan hasil karya nyata dari keseriusan dan kemauan yang besar dari pemerintah dan DPRRI, untuk menyusun perubahan Undang-Undang tentang Landas Kontinen yang lebih sesuai kondisi saat ini dan memperkuat dasar hukum dalam melakukan klaim perundingan penyelesaian batas dan penegakan hukum di landas kontinen.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen DPRRI, yang telah berkenan melakukan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen.

Sebagai negara kepulauan wilayah laut Indonesia memiliki berbagai fungsi yang sangat berarti bagi kelangsungan hidup bangsa. Oleh sebab itu, kedaulatan wilayah laut perlu dipertahankan. Untuk mewujudkan hal ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia menata batas-batas maritim sesuai dengan hukum internasional. Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unclos 1982 terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu laut territorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Negara Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, yang artinya Indonesia memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut di wilayah tersebut, termasuk di dalam lapisan tanah di bawahnya. Untuk menjaga hak berdaulat tersebut, Indonesia perlu membuat ketentuan mengenai landas kontinen yang mengacu kepada hukum internasional. Aturan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen yang disusun dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen.

Adapun materi muatan RUU Landas Kontinen mencakup 11 Bab dan 59 Pasal, yang mengatur tentang ketentuan umum, batas landas kontinen, hak

berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen. Kegiatan yang dapat dilakukan, perlindungan lingkungan laut, tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan laut dan sumber daya alam, kemudian pengawasan dan penegakan hukum, serta ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Landas kontinen dicirikan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, masih merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. RUU ini telah mengadopsi UNCLOS 1982 yang mengatur batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal berdasarkan kriteria geologi dan jarak dengan tidak melebihi 350 mil laut.

### **Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,**

*Urgency* dari perubahan undang-undang ini diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan klaim atas landas kontinen di atas 200 mil laut. Pelaksanaan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen.

Perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga dan pelaksanaan penegakan hukum di landas kontinen.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen didasari dengan beberapa pertimbangan, yaitu landasan filosofis, yaitu:

1. Hak berdaulat untuk mengelola landas kontinen melalui eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
2. Kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut.
3. Pemanfaatan laut untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia sehingga tercipta keadilan sosial, dan
4. Menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menciptakan perdamaian dunia.

Landasan sosiologis, yaitu:

1. Potensi sumber daya alam di wilayah landas kontinen cukup besar.
2. Penting untuk menetapkan batas luar landas kontinen.
3. Peluang optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen.
4. Penetapan batas terluar wilayah hak berdaulat negara sebagai media pemersatu bangsa.

Landasan yuridis, yaitu:

1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dimaksud memberikan kewenangan Presiden dan DPRRI untuk membentuk undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Memberikan dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen. Selain itu, memberikan kerangka umum untuk pengaturan kegiatan di landas kontinen, perlindungan lingkungan laut, tanggung jawab dan ganti rugi, pengawasan dan penegakan hukum dan submisi landas kontinen di luar 200 mil laut kepada Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Yang selanjutnya akan diatur lebih rinci dalam Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

**Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati,**

Dapat kami laporkan proses penyusunan rancangan undang-undang ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan kronologi sebagai berikut:

- a. Tahun 2017, KKP bertindak sebagai pemrakarsa dari pemerintah.
- b. Tahun 2018, KKP menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen kepada presiden.
- c. Tahun 2019, naskah rancangan undang-undang dibahas dan ditelaah oleh kementerian atau lembaga terkait.
- d. Tahun 2020, telah dihasilkan beberapa hal:
  1. Penyelesaian terhadap masukan Kementerian Pertahanan terkait pengaturan kegiatan militer asing di landas kontinen dan masukan dari Kementerian Luar Negeri terkait pengaturan pipa dan atau kabel bawah laut.
  2. Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen masuk dalam *long list* Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.
  3. Penyampaian rancangan undang-undang oleh Presiden kepada DPRRI, DPDRI, melalui surat nomor R-42/Pres/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020.
- e. Tahun 2021 Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional, Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 sesuai keputusan DPRRI Nomor 1/DPR-RI/IV/2020-2021.

**Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati,**

Sesuai UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara pantai berhak melaksanakan hak berdaulat pada landas kontinennya untuk tujuan mengeksplorasi serta mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Hak-hak tersebut bersifat eksklusif dalam pengertian bahwa jika negara pantai tidak mengeksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alamnya, maka tidak ada seorang atau suatu negara dapat melakukan aktifitas apa pun atau melakukan klaim atas landasan kontinen tersebut tanpa persetujuan dari negara-negara pantai. Hal ini berarti Indonesia harus menggunakan hak-haknya secara wajar sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Terkait pemanfaatan sumber daya alam yang ada di landas kontinen Pemerintah Indonesia telah melakukan perluasan landas kontinen bagian Barat Sumatera yang telah didaftarkan ke Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Juni 2008 dan telah mendapat rekomendasi dari komisi pada tanggal 28 Maret 2011, seluas 4.209 kilo meter persegi. Tahun 2020 telah dilaksanakan submisi perluasan landas kontinen di Barat Daya Sumatera seluas 211.397,7 kilo meter persegi.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah melakukan perluasan landas kontinen Utara Papua yang telah didaftarkan ke Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 April 2019 seluas 196.568,9 kilo meter persegi.

**Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,**

Demikian yang dapat kami sampaikan selaku koordinator pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Dan untuk itu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Pansus DPRRI dengan disertai harapan agar Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dapat dilakukan pembahasan materi substansi untuk selanjutnya ditandatangani dan disahkan secara resmi menjadi undang-undang, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam menyelesaikan tugas mulia ini.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Om santi santi santi om.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Menteri atas penjelasan awal dalam raker ini.  
Ada tambahan dari Kemenhan, kira-kira.

**WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETJEN TNI M. HERINDRA):**

Terima kasih.

**Yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen.**

**KETUA RAPAT:**

Mohon diperkenalkan diri Pak.

**WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETJEN TNI M. HERINDRA):**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Banyak yang nggak paham, karena ketampanan Bapak ini kan tertutup soalnya.

**WAKIL MENTERI PERTAHANAN (LETJEN TNI M. HERINDRA):**

Saya buka dululah.

**Hadirin yang berbahagia,**

Ijin saya memperkenalkan diri saya adalah Herindra, jabatan Wakil Menteri Pertahanan. Pada kesempatan ini, saya mewakili Pak Menhan karena beliau ada kegiatan dan saya menjabat sebagai Wamenhan II karena Wamenhan I ada di sebelah saya ini Pak, beliau Wamenhan dan saya penggantinya Pak, siap. Saya Wamenhan II, Wamenhan I di sebelah kanan saya.

Jadi sebenarnya tadi dari Pimpinan dari Pak Menteri KKP sudah juga mewakili dari Kementerian Pertahanan, karena ketika beliau menjabat sebagai Wamenhan beliau juga sudah banyak memberikan masukan kepada KKP tentunya dan saya tinggal melanjutkan.

Saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa pentingnya RUU ini segera disahkan ke dalam bentuk undang-undang, karena kita masih banyak PR Pak, khususnya di laut. Itu juga akan mengakibatkan keragu-raguan dari petugas kita utamanya Angkatan Laut, ketika dia harus mengadakan penegakan hukum di laut. Ini dengan adanya undang-undang ini diharapkan nanti petugas-petugas kami di laut tidak akan ragu-ragu lagi. Masih banyak PR kita Pak, masalah di laut, masalah batas maritim juga kita juga belum punya. Kalau kita undang-undang saja belum bagaimana nanti negara lain akan mengakui hak-hak kita di laut. Makanya Pak, kami dari Kemenhan mendorong untuk undang-undang dibahas dan nanti segera disahkan oleh DPRRI.

Memang dalam RUU ini sudah banyak memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, khususnya di Pasal 43, bla-bla-bla sudah kita bahas di KKP. Mungkin nanti juga secara detail akan kita bahas ke hal-hal yang lebih detail. Sekali lagi Pak, kami dari Kemenhan, Kementerian Pertahanan mendorong agar RUU ini segera dapat kita lanjutkan ke undang-undang.

Demikian Pak, dari Kementerian Pertahanan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kan enak itu tadi masih ketutup-tutup Pak, soalnya.

Terima kasih banyak Pak Herindra ini bukan asing lagi ini, Abang, jadi kita santai sama beliau.

Dari Kemenlu Pak, monggo Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Jangan lupa sampaikan jenis kelaminnya Pak.

**DIREKTUR HUKUM DAN PERJANJIAN KEWILAYAHAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI (BEBEB ABDUL KURNIA NUGRAHA DJUNDJUNAN):**

Siap Bapak Pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Bebeb Djundjunan, saya saat ini menjabat sebagai Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Dan mohon menyampaikan permohonan maaf Ibu Menlu, karena beliau sedang memimpin rapat antara Kemenlu Asean dan Amerika Serikat saat ini.

Yang prinsip kami dalam pembahasan ini telah tertampung semua Bapak, dalam draft ini karena memang undang-undang ini sudah menampung seluruh kepentingan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut 82 yang telah kita ratifikasi, sehingga kami sangat mendukung untuk menyegerakan proses ini diselesaikan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Dari Kemenkumham saya pikir kita bisa kita skip ya, kita anggaplah tiga kementerian ini bisa mewakili dan merepresentasikan perwakilan dari pemerintah. Secara prinsip Pak, kita dari Pansus RUU Landas Kontinen bisa memahami apabila dari masing-masing kementerian diwakilkan. Namun, memang nanti kita berharap pada saatnya ataupun agenda-agenda tertentu yang memang kita butuhkan betul-betul pandangan ataupun RDP ataupun dari masing-masing kementerian, kita berharap nanti bisa kehadiran dari menteri-menterinya langsung.

Oke, terima kasih banyak pandangan atau penjelasan dari pemerintah. Pada kesempatan kali ini kita membuka waktu pandangan dari masing-masing

fraksi. Nanti kami berharap dari saya selaku Pimpinan Raker ini memberikan perwakilan dari masing-masing fraksi, ada dua hal, yang pertama bisa mungkin disampaikan pandangan awalnya saja ataupun terkait mengenai konsen-konsen apa kita terhadap RUU ini.

Lalu yang kedua adalah menyetujui untuk dilanjutkan atau tidak, karena kita memahami bahwa hampir tidak mungkin kita menyetujui isi dari RUU tersebut, karena kita baru rapat kerja ini. Jadi, nanti di dalam raker ini kita hanya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan saja. Namun tetap dari masing-masing fraksi apabila ada sedikit konsen dan lain sebagainya silakan saja disampaikan, tinggal nanti kita lihat waktunya mungkin tidak bisa terlalu panjang. Nanti bisa kita elaborasi lebih dalam di dalam agenda-agenda selanjutnya.

Saya ingin menegaskan, Bapak-bapak dari kementerian, kita memahami dan sangat menghormati dan kita akan mempertimbangkan secara dalam dan penuh terkait harapan untuk mempercepat atau *men-speed up* pembahasan RUU ini. Namun, pada saat pembahasan rapat internal kemarin ada memang banyak aspirasi dari teman-teman tetap tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Artinya, prinsip kehati-hatian jadi saya pakai diksi kehati-hatian mungkin, karena melihat dan mengingat *urgency* ada narasi besar, yaitu kedaulatan yang memang harus kita jaga di dalam RUU ini. Jadi, kita akan upayakan semaksimal mungkin pembahasan ini sesuai, optimal dengan tempo waktu yang cukup cepat, namun prinsip kehati-hatian itu juga akan kita pegang teguh. Jadi saya pikir itu.

Dan saya kasih kesempatan dulu kepada Fraksi PDIP, *monggo* silakan namun sebelumnya diperkenalkan dulu siapa yang akan menyampaikan.

Terima kasih, silakan Mbak.

**F-PDIP (REZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Terima kasih Ketua, Pimpinan.**

Perkenalkan saya Riezky Aprilia dari Fraksi PDI Perjuangan A-147, Sumatera Selatan I.

Terima kasih atas kesempatannya, kami dari Fraksi PDI Perjuangan bapak-bapak yang hadir di sini. Pada dasarnya tadi mencermati kalimat yang disampaikan oleh Pimpinan, terkait RUU Landas Kontinen ini memang perlu kita sikapi dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sekali lagi mungkin itu yang juga perlu kita sampaikan, karena bukan hanya sekedar kedaulatan di sini hadir perwakilan dari Menlu, bahwa ini bersinggungan juga dengan banyak konvensi perjanjian internasional yang harus menjadi perhatian kita juga tanpa mengurangi kedaulatan yang ada di atas laut.

Nah, sehubungan dengan juga adanya RUU prioritas, pimpinan yang harus diselesaikan oleh DPRRI dan saya membaca di paparan secara singkat

tadi. Paparan KKP menyatakan bahwa ini sebenarnya masuk di dalam *long list*, di dalam *long list* sekali lagi saya tekankan di situ kita sangat paham undang-undang ini ada *urgency*-nya bicara daya di laut tadi Pak, tetapi tetap kita memperhatikan hal-hal prinsip yang jangan sampai kita tergesa-gesa akan tetapi hasil akhir juga ber-*impact* terhadap kedaulatan Indonesia itu sendiri.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan kurang lebih demikian yang disampaikan, melanjutkan untuk proses selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kami Fraksi PDI Perjuangan sekali lagi, bisa dilanjutkan Pimpinan. Jadi, kami dari Fraksi PDI Perjuangan bersepakat untuk melanjutkan dalam tahapan proses selanjutnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan.

Saya akhiri.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Mbak.

Waduh PDIP ini cerah-cerah perwakilannya wanita-wanita cantik semua, gimana nggak seger Bapak TB ini. Terima kasih banyak Mbak, *wong kito galo* asal jangan jadi *wong kito gilo*.

Selanjutnya dari Partai Golkar, ada dua yang ijin karena terbentur dengan matrik. Ada Pak Rudy Mas'ud, virtual, Pak Rudy bisa ikut bisa menyampaikan Pak Rudy mewakili Fraksi Partai Golkar, monitor nggak. Oke, kalau memang nggak monitor ya saya mewakili dari Fraksi Partai Golkar.

Pada prinsipnya seperti tadi yang di awal saya sudah sampaikan, kami dari Fraksi Partai Golkar menyetujui untuk dilanjutkan. Semoga pembahasan ini bisa memberikan faedah dan manfaat seluas-luasnya untuk kebaikan bangsa kita.

Terima kasih itu dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra, oke silakan Pak Bambang, *monggo*.

**WAKIL KETUA PANSUS RUU LANDAS KONTINEN/F-P. GERINDRA  
(BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati teman-teman Anggota Pansus Landas Kontinen,  
Dan yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil  
Menteri Pertahanan dan perwakilan dari Kemenlu,**

Baik, pada prinsipnya memang seperti tadi yang kita bicarakan sebelumnya bahwa RUU ini urgensitasnya sangat tinggi kalau kami melihatnya, bahkan Surpres turun lebih dulu daripada penetapan Prolegnas.

Kami memahami itu dan kami Fraksi Partai Gerindra menyatakan pendapat sama seperti Fraksi PDIP dan Partai Golkar, bahwa kami sepakat untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, sehingga undang-undang ini bisa segera menjadi, RUU ini bisa segera menjadi undang-undang dan bisa terlaksana di Indonesia ini.

Terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selanjutnya Nasdem, kalau memang tidak hadir bisa langsung diwakili oleh Pimpinan.

Terima kasih Pak, silakan Pak Taufik.

**WAKIL KETUA PANSUS RUU LANDAS KONTINEN/F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LLM.)**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi sama juga seperti yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra, bahwa pada prinsipnya kami dari Fraksi Partai NasDem menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan kita terkait dengan RUU Landas Kontinen ini. Terlebih lagi memang RUU ini pun sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Tentu juga seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Riezky dari PDI Perjuangan, bahwa kita harus cermat dan hati-hati karena beberapa point di dalam RUU Landas Kontinen ini akan juga berkaitan dengan hukum-hukum internasional. Oleh karena itu, maka nanti pendalaman tentu akan kita lakukan pada saat pembahasan tentang materi.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selanjutnya dari PKB, wah ini ada yang ayu dan juwi, Ibu Ratna.

Silakan Ibu, *monggo* Ibu, waktu dan tempat dipersilakan.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Ketua.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Perkenalkan saya Ratna Juwita Pak, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa A-46, Dapil Jawa Timur IX.

Terima kasih kesempatannya Ketua dan para Pimpinan, serta sahabat-sahabat seluruhnya. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan Minal Aidin Wal'faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Ketua, Pimpinan, sahabat-sahabat seluruhnya, juga Pak Menteri, Pak Wamen, serta perwakilan dari Kemenlu beserta jajarannya.

Yang pertama Ketua, kami menilai bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen ini merupakan instrumen penting begitu, yang nantinya kita harapkan bisa menjadi platform kepastian hukum yang mendukung nawacita pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara.

Khususnya dalam upaya bagaimana kita melaksanakan hak bangsa kita untuk bisa berdaulat dan kita memiliki kewenangan tertentu begitu di landas kontinen ini demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan cita-cita kita, yaitu menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini *Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur*.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Menteri terkait *urgency* dari rancangan undang-undang ini, maka kami mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju tentang Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen ini untuk segera dibahas sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan yang tadi disampaikan oleh Ketua.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pimpinan H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., Ketua ditandatangani, Drs. Fathan Sekretaris ditandatangani.

Terima kasih Ketua.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,  
Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Boleh, boleh, ini memang luar biasa ini.

Ini memang luar biasa PKB Pak, makanya tadi saya bilang ayu dan juwi, dan jangan lupa bukunya Cak Imin dibagikan juga nanti ke kita-kita, tadi sudah diumumkan di Rapat Paripurna kalau kita nggak baca, nggak lihat kayaknya kurang afdol ya Pak, malah makin mantap.

Selanjutnya dari Partai Demokrat, *monggo*.

**F-PD (Hj. RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Rekan-rekan dari lintas fraksi dan lintas komisi yang hormati dan  
banggakan,  
Bapak Menteri KKP, Pak Wamenhan, perwakilan dari Kementerian Luar  
Negeri yang saya hormati,**

Saya pegang di sini Pak Ketua, ini pandangan resmi fraksi yang sudah ditandatangani Ketua dan Sekretaris Fraksi, tapi kalau saya bacakan semua bisa 30 menit Pak. Jadi kesempatan di awal Pak Ketua, memberikan arahan bahwa jam 15.30 WIB selesai.

Tapi intinya saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi sudah disepakati dan menjadi *consensus* dari kawan-kawan lintas fraksi, bahwa ini adalah pembahasan yang sangat penting demi kedaulatan negara kita, ini juga merupakan salah satu langkah diplomasi terkait dengan pertahanan dan banyak sekali sektor yang terkait dengan permasalahan yang nantinya kita akan membahas secara komprehensif di pansus ini. Tapi nanti kami juga akan cob selaraskan jika ada hal-hal teknis yang perlu disetujui di Komisi I DPRRI bersama Pak Wamenhan dan Pak Kemlu, Pak Wamenhan I juga nanti kita undang kalau bisa cukup bisa hadir di sana Pak. Kalau di Komisi I DPRRI dipanggilnya masih Pak Wamenhan.

Tapi intinya pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat menyetujui Pak Ketua, Pak Menteri, Pak Wamen untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Semoga DPRRI ini *tag line* ya, semoga DPRRI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Nah itu Pak, saya wajib menyampaikan itu.

Pak Muslim ijin menyampaikan, saya ijin menyampaikan ke Pak Ketua dan Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih dari Demokrat, mantap.

Memang Demokrat ini memang muda-muda dia, segar. Jadi kalau yang sebelumnya ini Pak, sudah bukan lagi pemain tetapi pelatihnya pemain Pak.

Selanjutnya dari PKS, *monggo* mas.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Landas Kontinen,  
Bapak Menteri KKP, Wakil Menteri Pertahanan dan mewakili Menteri Luar Negeri,  
Bapak dan Ibu sekalian,**

Fraksi PKS memandang bahwa RUU Landas Kontinen ini ada 3 tujuannya Pak. Yang pertama, tentu untuk melindungi kepentingan nasional kita, baik secara ekonomi maupun pertahanan keamanan.

Yang kedua, saya kira perlu adanya kepastian hukum. Jadi kita ingin memastikan bahwa hukum kita dihargai oleh negara lain.

Yang ketiga adalah ingin memaksimalkan potensi ruang laut untuk kesejahteraan rakyat, karena kita tahu Pak Menteri KKP ya, kebetulan saya di Komisi IV DPRRI Pak Andi Akmal Pasluddin dari Dapil Sulawesi Selatan II di Komisi IV DPRRI, mitranya Pak Menteri KKP.

Kita ingin bahwa laut ini sebagai sumber untuk mensejahterakan daripada masyarakat kita atau rakyat kita Ketua. Oleh karena itu, perlu ada kepastian dan kejelasan, baik secara dasar hukum maupun keberpihakan negara terhadap pengelolaan laut kita.

Oleh karena itu Pimpinan, saya kira Fraksi PKS sama dengan fraksi yang lain setuju untuk kita lanjutkan pembahasan untuk di tahapan selanjutnya.

Demikian, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Selanjutnya Fraksi PAN, ada yang hadir virtual, PAN. Setuju, jadi yang virtual juga nggak ada ya, nggak ada ya, oke berarti bisa kita anggap tadi ada informasi Pak, dari kesekretariatan bahwa dari Fraksi PAN sudah menyampaikan dan setuju Pak, dilanjutkan.

Lalu yang terakhir Fraksi PPP, yang hadir virtual ada. Ada masukan informasi surat atau belum ada. Oke, berarti kita anggap karena memang tidak hadir dan juga belum memberikan surat dan lain sebagainya kita anggap abstain ya, boleh Pak ya.

Jadi dari 9 Fraksi yang hadir, 8 fraksi menyatakan setuju, 1 fraksi menyatakan abstain. Artinya apa? Forum hari ini bisa kita anggap sebagai forum rapat kerja di mana semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan mayoritas menyampaikan setuju untuk dilanjutkan.

Boleh kita setujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Memasuki agenda selanjutnya Pak, yaitu tentang jadwal acara dan mekanisme pembahasan. Beberapa waktu yang lalu kami dari 9 fraksi sudah melakukan rapat internal dan mengagendakan pembahasan jadwal Pak. Artinya apa? Di dalam forum raker ini kami juga akan menyampaikan kepada Pak Menteri dan perwakilan dari masing-masing kementerian terkait mengenai jadwal.

Namun, secara umum saja karena kalau kita *break down* detail saya pikir tidak akan cukup waktu. Namun, pada prinsipnya jadwal yang kita sahkan ini sangat fleksible dan tidak menutup kemungkinan untuk kita *me-review* kembali disesuaikan dengan jadwal kita masing-masing. Jadi, tidak kaku namun kita tetap buka ruang untuk nanti masing-masing dari kementerian atau dari kami-kami nanti yang menyesuaikan sesuai dengan jadwal dan agendanya.

Secara prinsip ada kurang lebih 4 agenda besar, yaitu rancangan jadwal acara rapat-rapat pansus sudah kita sampaikan Pak, di masing-masing kalau tidak salah dari kesekretariatan. Lalu yaitu terkait Pembicaraan Tingkat I yang diawali dengan Rapat Internal Pansus pada tanggal 19 Mei 2021 yang dilanjutkan pada hari ini dengan rapat kerja dengan pemerintah, yaitu tanggal 25 Mei 2021. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang Landas Kontinen yang dilanjutkan dengan pandangan fraksi dan pengesahan jadwal dan mekanisme pembahasan.

Selanjutnya kita mengagendakan, yaitu untuk melakukan kunjungan kerja yang akan dilaksanakan pada Masa Sidang ke-5 ini di mana dalam dilanjutkan dengan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan beberapa kementerian yang terkait dengan substansi RUU dan RDP maupun RDPU dalam rangka mendapatkan masukan dan penjelasan untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan dari kami-kami ini para Anggota Pansus.

Terhadap substansi materi dari rancangan undang-undang khususnya fraksi-fraksi dalam nanti menyampaikan penyusunan DIM. Yang terakhir adalah yang keempat rapat kerja, rapat panja, rapat timus dan timsin sebagaimana dapat kita lihat dalam daftar acara dimaksud akan dilaksanakan

sampai dengan akhir dari Pembicaraan Tingkat I pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Adapun Pak, kurang lebih jadwal kita nanti akan ada RDPU dari pihak akademisi, kita juga akan mengundang beberapa akademisi untuk memberikan pandangan, praktisi dan lain sebagainya.

Lalu yang kedua adalah kita akan melakukan raker tentunya dengan beberapa kementerian, Kemenlu, Kemenhan, Kementerian ESDM, memang ada beberapa pertanyaan kenapa Kementerian ESDM tidak kita ajak di dalam rapat ini, karena Surpresnya tidak memasukkan Kementerian ESDM Pak. Jadi artinya apa? Aspek formalnya tidak bisa kita undang, namun dalam substantive terkait praktek di lapangan kita menganggap perlu kita melibatkan Kementerian ESDM untuk kita mintai pandangan dan keterangannya.

Karena kita paham betul, bahwa salah satu *urgency* kenapa RUU ini harus segera disahkan menjadi undang-undang karena mengingat ada juga mengenai sumber daya alam kita. Jadi, saya pikir, kita pikir, perlu juga nanti kita mengagendakan dengan Kementerian ESDM.

Lalu dengan Kementerian Koordinator Investasi dan Badan BKPM yang sekarang sudah menjadi Kementerian Investasi, karena tadi. Lalu kita juga akan mengagendakan dengan Kementerian Pertahanan sudah, plus TNI Angkatan Laut dan Bakamla Pak, dan juga kita ada rencana untuk mengagendakan dengan Badan Informasi Geospasial yang kita anggap juga itu perlu.

Dan yang kedua adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, karena baru saja sudah diketok dan fokus pemerintah juga untuk mendorong BRIN ini menjadi fokus riset dan kita menganggap isu-isu kelautan juga kita perlu melibatkan BRIN.

Dan juga kita juga akan memanggil RDP, yaitu beberapa perusahaan-perusahaan perminyakan, perusahaan-perusahaan minyak, salah satunya seperti Pertamina, Inpex dan segala macamnya karena sebagai contoh kayak di Maluku itu Pak, itu Blok Masela juga itu menjadi penting untuk kita panggil juga. Dan di sini saya pikir itu kurang lebih.

Dan terkait rencana kunjungan kerja kita, kita sudah mengagendakan beberapa kunjungan kerja, yaitu ke Provinsi Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Provinsi Papua, NTT, Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Maluku Utara.

Besar harapan kami dalam setiap kunjungan kerja ini minimal ada perwakilan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa ikut mendampingi. Silakan saja nanti siapa yang ditunjuk untuk mendampingi kita dalam setiap acara. Juga dari Kemenhan dan Kemenlu.

Saya pikir itu penting bagi kami supaya kita bisa dapat semakin banyak kita mendapatkan masukan tentunya ini semakin bagus dan semakin cepat kita bisa memproses RUU ini. Jadi kurang lebih seperti itu jadwalnya.

Demikian saya sampaikan Pak, dan selanjutnya saya pikir tadi dari pandangan fraksi sudah, dari jadwal acara nanti juga diberikan oleh kesekretariatan yang detailnya. Tapi secara umum gambarannya kurang lebih tadi saya sampaikan seperti itu. Dari Pimpinan ada *concern* Pak.

Pak TB silakan Pak TB.

**WAKIL KETUA PANSUS RUU LANDAS KONTINEN/F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Dari Pemerintah dan rekan-rekan yang terhormat.  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Dalam konteks kesempurnaan penyelesaian RUU ini, setahu kami Komisi I DPRRI ini bekerja sama juga dengan Kementerian Luar Negeri sebagai mitra, itu ada dan sedang menyelesaikan UPP, di beberapa titik di laut, ada yang baru sedang proses, sedang dalam proses dan kemudian terjadi *stagnan*.

Nah, saya mohon dengan hormat kepada yang mewakili Kemenlu dapat memaparkannya secara skematis kepada kami, kepada pansus ini, supaya nanti di dalam menyelesaikan masalah-masalah batas itu menjadi lebih valid, solid, dan tidak bermasalah ke depan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak TB.

Ini kalau yang cukup ahli menyampaikan jadi agak paham dia isinya. Jadi memang aspek historisnya memang ternyata cukup perlu Pak, memang tadi kita ada bahas memang ternyata ada beberapa kesepakatan-kesepakatan dalam tiap-tiap negara tetangga memang sudah tercapai. Jadi, saya pikir itu juga perlu nanti disampaikan di dalam forum ini agar kita tidak *misleading*-lah, kurang lebih seperti itu.

Mas Tobas cukup? Pak Bambang? Oh, lagi ke belakang.

Jadi saya pikir cukup itu pandangan dari, selanjutnya kami persilakan tanggapan dari pemerintah untuk merespon yang terakhir kali, sambil nanti kita putuskan dan kita tutup rapat ini.

Silakan Pak Menteri.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):**

Baik.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota yang hadir, baik secara fisik maupun virtual atas persetujuannya. Jadi secara menyeluruh saya bisa menyatakan bahwa semua semua setuju untuk dilanjutkan. Jadi saya kira seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan, kami akan selalu mendampingi dari seluruh kegiatan yang rangkaian kegiatan yang akan dijalankan.

Saya kira begitu saja, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Oke, saya pikir pas tugas saya adalah mengantarkan rapat ini sampai jam 15.30 WIB. Jadi dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim*, saya minta apakah peserta dalam rapat kerja ini bisa menyetujui untuk kita lanjutkan pembahasan kita, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

**Bapak-bapak, Ibu dan Anggota Pansus yang saya hormati,  
Pemerintah yang saya hormati,  
Dan hadirin semuanya yang berbahagia,**

Puji dan syukur akhirnya kita *Alhamdulillah*, bisa menyelesaikan rapat kerja ini sesuai dengan waktu jam 15.26 WIB, jadi saya agak korting sedikit 3 menit. Semoga apa yang kita setuju pada hari ini dan apa agenda kita ke depan bisa betul-betul dari awal saya bilang, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang nyata, baik dari sisi kedaulatan negara, dari sisi pendapatan devisa negara, karena kita memahami betul bahwa pembahasan ini juga erat kaitannya terhadap sumber daya alam kita di tengah kondisi situasi negara kita, di tengah kondisi pandemi ini yang memang dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari kita semua, baik itu kolaborasi antar eksekutif dan legislatif.

Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

6

*Om swasti astu, Namo budhaya, Salam kebajikan.*

Dengan demikian raker tahap pertama kali ini saya tutup, terima kasih.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)**

JAKARTA, 25 MEI 2021  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



**ENDAH SRI LESTARI, S.H., M.SI.**  
**NIP. 197104031996032001**

9